

Perempuan Islam dalam Politik (Analisis Filsafat Ekofeminisme)

Fatrawati Kumari

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari

The Rejection of the Moslems jurists and scholars on women's involvement in politics has occurred since the age of classical Islam. Domestication and restrictions on women in the history of Islam has encouraged women to demonstrate their capability in politics. Employing qualitative method and ecofeminism philosophy approach, this study is conducted to answer the question to what extent the success of women in politics. The result of the study shows that the Moslems women have successfully gained a historical recognition for their ability to take significant role in politics both in Islamic world and Indonesia. In addition, the characteristics of Moslems women's role in politics turn out to lead to masculinity, which tend to follow the men's style. Moreover, feminism is an alternative of counterweight to the dominance of masculinity contained in a patriarchal political system.

Keywords: *women, politics, masculinity.*

Penolakan para fuqaha dan ulama atas keterlibatan perempuan Islam di dunia politik telah terjadi sejak masa klasik Islam. Domestikasi dan pembatasan perempuan dalam sejarah Islam ternyata telah mendorong perempuan untuk menunjukkan kemampuannya dalam berpolitik. Untuk menjawab pertanyaan tentang sejauh mana keberhasilan perempuan tersebut dilakukan penelusuran dan kajian khusus dan mendalam. Melalui metode kualitatif dan pendekatan filsafat ekofeminisme, kajian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, perempuan Islam telah berhasil mendapat pengakuan sejarah atas kemampuannya dalam mengambil peran penting dalam politik, baik di dunia Islam maupun lokal Indonesia. Kedua, karakteristik peran politik perempuan Islam ternyata lebih mengarah ke maskulinitas, yaitu cenderung menggunakan gaya dan cara laki-laki. Ketiga, feminitas merupakan alternatif penyeimbang bagi dominasi maskulinitas yang terdapat dalam sistem politik patriarki.

Kata kunci: *perempuan-politik-maskulin.*

Pendahuluan

Keadaan perempuan dalam kenyataan sejarah dapat dikatakan tidak mengembirakan karena ruang gerak perempuan tidak seluas laki-laki. Setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian mulai masa Khulafa al-Rasyidin, tidak banyak perempuan tampil di kancah politik. Selama ini, dunia politik merupakan salah satu aktifitas publik yang paling strategis dan paling “keras” diantara aktifitas publik lain sehingga hanya laki-laki yang dianggap paling tepat terlibat dalam perkara tersebut. Adapun perempuan,

dipandang hanya cocok di wilayah domestik. Rumah merupakan tempat terbaik bagi perempuan. Banyak alasan dikemukakan atas pembatasan tersebut dan yang paling dominan adalah alasan teologis. Alasan-alasan tersebut ditampilkan untuk memperkuat dan melanggengkan domestikasi perempuan. Atas kenyataan tersebut, maka bukan hal mengherankan jika dalam rangka pembatasan tersebut, perempuan yang akan keluar rumah meskipun hanya sebentar harus mengikuti syarat/aturan yang telah ditentukan, seperti harus dengan muhrim, menutup

seluruh tubuh kecuali mata dan lain sebagainya. Keadaan tersebut tidak memungkinkan bagi perempuan untuk memasuki dunia lain kecuali domestic (Abdullah 2006, 6-28).

Secara umum, alasan pembatasan ruang gerak perempuan berkisar pada dua hal pokok. Pertama, perempuan dengan segala aspek ketubuhan yang dimilikinya dianggap sebagai sumber dan pengundang nafsu birahi. Bahkan perempuan seakan disepadankan dengan nafsu itu sendiri sehingga siapapun yang berada dekat dengannya akan “berbahaya”. Atas stigma tersebut, jika ada kejadian yang merugikan perempuan, seperti dilecehkan, diganggu atau mendapat berbagai perlakuan tidak terhormat dari laki-laki, seringkali yang disalahkan bukan laki-laki, melainkan pihak perempuan yang sesungguhnya adalah korban. Stigma yang sering digunakan untuk perempuan adalah “sumber fitnah”, yaitu sumber godaan dan nafsu terendah manusia yang tak lain adalah “libido seksual” (Muhammad 2006, 275-276).

Alasan kedua yang sering dikemukakan adalah anggapan, bahwa perempuan merupakan pendorong atau stimulan bagi terjadinya konflik sosial. Alasan ini dikaitkan dengan pelabelan terhadap perempuan, seperti emosi yang tidak stabil sehingga dianggap akan berdampak pada ketidakjernihan dalam membuat keputusan penting, ditambah lagi sifat lemah yang bersumber dari dalam fisik perempuan itu sendiri, sehingga makin memperkuat alasan untuk membatasi ruang gerak perempuan. Melalui alasan-alasan tersebut pembatasan perempuan dipandang sebagai hal yang masuk akal karena keadaan akan tetap stabil/ baik-baik saja, terhindar dari kekacauan dan yang terpenting menurut alasan ini, kemuliaan agama tetap terpelihara.

Peminggiran perempuan merupakan suatu keharusan. Pernyataan Said al-Afghani dalam “Aisyah wa al-Siyasah” sebagaimana dikutip K.H.Husein Muhammad, salah satu contoh peinggiran atau pelarangan tersebut adalah: “al-siyasah ‘ala al-mar’ah haram shiyannah li al mujtama’ mi al takhabbuth wa su-u al munqalab” (politik bagi perempuan adalah haram (hal ini) untuk melindungi masyarakat dari kekacauan) (Muhammad 2013, 167-169).

Pengharaman peran publik perempuan dalam Islam sangat terlihat pada fiqih, terutama fiqih konservatif. Selama ini kitab fiqih merupakan karya intelektual tentang hukum yang selalu menjadi rujukan umat Islam. Melalui ungkapan-ungkapan fiqih yang berat sebelah maka menjadi wajar jika pandangan umat Islam mengenai perempuan dan penempatan perempuan dalam kenyataan sejarah Islam sebagaimana tampilan yang terdapat dalam fiqih yang juga berat sebelah. Perempuan dengan segala sifat yang melekat di dalam dirinya dianggap tidak akan mampu menjadi pemimpin, baik di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif (Muhammad 2007, 188-195). Melalui alasan-alasan tersebut, domestikasi perempuan seakan semakin rasionalitasnya (Asa 2000, 110-120).

Fiqih secara tegas melarang perempuan menjadi pemimpin karena perempuan dianggap tidak memenuhi persyaratan menjadi pemimpin sebagaimana yang telah ditentukan ulama dan fuqaha. Diantara persyaratan tersebut adalah: Islam, berakal, dewasa, merdeka, sehat, laki-laki, pemberani, memahami persoalan kenegaraan/ perundang-undangan (untuk eksekutif dan legislatif) dan mengerti hukum-hukum syariat (untuk yudikatif). Perempuan dianggap tidak memenuhi persyaratan “berakal”. Tingkat

kecerdasan perempuan dianggap jauh di bawah laki-laki (naqishat al-aql wa qalilat ar-ra'y). Alasan lain adalah karena dalam sejarah Islam, perempuan memang belum pernah menduduki posisi-posisi tersebut. Alasan terpenting yang menggarisbawahi alasan-alasan tersebut adalah, bahwa perempuan bukan laki-laki. Alasan yang stereotipe gender ini menjadi dasar sekaligus kunci penutup bagi gerak politik perempuan (Muhammad 2007, 195).

Meskipun tekanan fiqh konvensional begitu kuat, tetapi berbagai pendekatan baru memberi dasar pijak bagi hak gerak politik perempuan, tak terkecuali bagi pendekatan fiqh baru. Al-Qur'an sendiri telah menempatkan perempuan setara dengan laki-laki (al-Hujurat/ 49: 13). Ulama fiqh terkemuka, seperti: al-Ghazali (w.505 H/ 1111 M), Fakhruddin al-Razi (w.606 H.), Izzudin bin Abdussalam (w.660 H), Syihabuddin al-Qarafi (w.685 H), Najmuddin ath-Thufi (w.716 H), Ibn Taimiyah (w.728 H), Abu Ishaq as-Syathibi (w.790 H) dan Muhammad bin ath-Thahir bin Asyur (w.1393 H) merupakan ulama yang sepakat menempatkan kemaslahatan sebagai dasar dan tujuan dari syariat Islam (Muhammad 2007, 187, 188).

Melalui kemaslahatan, ulama fiqh tersebut menghadirkan Islam dalam bentuk yang humanis, adil, egaliter dan demokratis. Ahli Tafsir dan sejarawan Islam terkemuka seperti Imam Malik dan Thabari dengan jelas menganggap perempuan dapat menjadi pemimpin dalam bidang hukum (qadhi), kepala negara dan administrasi kenegaraan. Khalifah Umar pun pernah menunjuk seorang perempuan sebagai pimpinan inspektur pasar.¹ Oleh karena itu,

¹Di kalangan fuqaha dan ulama terdapat perbedaan pendapat antara yang menolak dan menerima kepemimpinan perempuan.

penolakan terhadap kepemimpinan perempuan bukan merupakan harga mati karena perempuan seharusnya dilihat secara utuh, yaitu sebagai manusia dengan segala kelemahan dan kekuatannya sebagaimana laki-laki.

Meski telah banyak pandangan yang menerima pelibatan perempuan dalam politik, namun penolakan terus ada sampai saat ini. Persoalan tersebut seperti hidup dalam ruang tersendiri, menaik dan menurun mengiringi banyak kepentingan yang terdapat dalam dunia politik. Di luar perdebatan tersebut terdapat ruang lain, yaitu ruang realitas yang menggambarkan kenyataan perempuan; ruang yang memotret rekam jejak perempuan apa adanya sekaligus menjawab pertanyaan tentang ada atau tidak keterlibatan perempuan dalam sejarah politik Islam. Melalui penelusuran masa lalu, perempuan akan dapat menarik garis penghubung bagi sejarah terbaiknya di masa depan dengan kajian berikut ini.

Perempuan Islam dalam Sejarah Politik Klasik

Politik (hukum) selama ini diartikan sebagai tindakan atau kebijakan mengenai suatu masalah yang berkaitan dengan masyarakat, pemerintahan atau negara.² Dari pengertian tersebut dapat diketahui, bahwa politik bukan merupakan suatu perkara kecil dan ringan, melainkan perkara besar dan

Pendapat yang menerima perlu mendapat perhatian khusus sebagaimana yang dikemukakan dalam: Ashgar Ali Engineer, 2000, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.124-125.

²Quraisy Shihab membuat definisi dan penjelasan tentang dalil-dalil yang selama ini digunakan sebagian masyarakat Islam untuk menolak keterlibatan perempuan dalam urusan politik. Uraian tersebut dapat dilihat dalam: M. Quraisy Shihab, 2005, Perempuan, Jakarta: Lentera Hati, 343-345.

berat karena politik menyangkut kepentingan masyarakat luas dalam sebuah pemeritahan. Oleh karena itu, tidak heran jika seseorang orang yang akan memimpin negara diharuskan memenuhi persyaratan yang juga berat. Begitu beratnya, sehingga hanya jenis kelamin tertentu (baca: laki-laki) yang dipandang paling memenuhi persyaratan tersebut.

Meski demikian, langkah perempuan menuju dunia politik tidak berarti terhenti. Dalam kenyataannya, keterlibatan perempuan di wilayah politik makin terbuka luas beriringan dengan penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan yang juga makin terbuka. Perempuan terus menunjukkan eksistensinya di berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang politik sampai keagamaan. Aisyah adalah seorang ahli tafsir terkemuka sehingga sejumlah besar penafsirannya banyak dimuat di dalam Shahih Muslim. Hampir semua isteri Nabi, seperti: Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Atiyah, Asma binti Abu Bakar, Ummu Hani dan Fatimah binti Qais meriwayatkan banyak hadis. Sebagian sahabat perempuan Nabi pun, seperti: Rafidah Aslamiyah, Ummu Muta dan Ummu Kabsyah memiliki keahlian di bidang pengobatan (thib) dan bedah (jarrahi).³ Sejarah telah mencatat keterlibatan perempuan di semua bidang tersebut, terlebih lagi di bidang politik yang secara nyata sebagian diantaranya dikemukakan dalam pembahasan berikut ini.

³Ashgar Ali Engineer juga mengemukakan lam bidang banyak perempuan pada masa Nabi yang ahli dalam bidang sastra dan seni, seperti: Khansa, Safiyah, Atikah, Hind binti Harits dan Kabsyah binti Rafi. Lihat, Ashgar Ali Engineer, 2000, Ashgar Ali Engineer, 2000, h. 127.

Radhiyyah merupakan salah satu tokoh perempuan Islam yang telah menunjukkan kemampuannya dalam memimpin. Radhiyyah yang menyandang gelar “Sultanah” atau “Ratu”, berkuasa di Delhi tahun 634 H/ 1236 M. Radhiyyah meraih kekuasaan setelah ayahnya Raja Delhi (Sultan Iltutmisy) wafat. Ayahnya mantan budak asal Turki yang mengabdikan sebagai pimpinan militer bangsa Mamluk sampai berhasil menggantikan majikannya (para sultan di Gaznah dan Sultan Quthb al-Din Aybak) sebagai Raja.⁴

Sebagaimana ayahnya, Radhiyyah tumbuh sebagai pemimpin negara kuat dan tangguh. Kemampuan dan bakat Radhiyyah sebagai pemimpin terlihat dari prestasi-prestasi yang dicapainya mulai sebelum mendapat kepercayaan sebagai kepala pemerintahan. Diantara prestasinya yang cemerlang adalah keberhasilannya memimpin pasukan militer saat menjabat sebagai jenderal sekitar tahun 626 H/ 1229 M. Ketangguhannya terbukti selama masa kepemimpinannya sehingga Radhiyyah memiliki dua gelar untuk dirinya, yaitu Radhiyyah al-Dunya wa al-Din (yang diridhai di dunia dan agama/ akhirat) dan Balqis Jihan (nama Arab ratu Syaba dan gelar kebangsawanan Arab). Radhiyyah

⁴Berkat prestasi dan keberanian Iltutmisy (ayah Radhiyyah), Sultan Quthb al-Din Aybak menikahkannya dengan putrinya. Setelah sultan wafat, Iltutmisy mengambil alih kekuasaan, mendapat surat pembebasan diri sebagai budak yang ditandatangani para ahli hukum dan mendapat pengakuan resmi dari khalifah Abbasiyah (sama-sama beraliran Suni). Radhiyyah merupakan anak dari hasil pernikahan Iltutmisy dengan puteri Sultan Quth al-Din Aybak. Lihat, Fatima Mernissi, 1994, Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan, terj. “The Forgotten Queen of Islam” oleh Rahmani Astuti dan Enna Hadi, Bandung: Mizan, h. 148-149.

mengabadikan kekuasaan dengan membuat tulisan dalam cetakan mata uang yang isinya adalah: "Pilar Kaum Perempuan, Ratu Segala Zaman, Sultanah Radhiyyah Binti Syams al-Din Iltutmisy". Ada pula tulisan dalam mata uang lain yang menunjukkan kesetiannya pada dinasti Abbasiyah yang isinya berikut ini: "Imam al-Mustansir, Pemimpin Kaum Beriman, Sultan Agung Kegemilangan Dunia dan Iman. (Adapun) Malika Putri Iltutmisy, Membawa Kegemilangan Kaum Beriman."⁵

Sesaat setelah resmi menjadi pemimpin, Radhiyyah berusaha tampil selayaknya seorang pemimpin saat itu dengan membuka wajah, memendekkan rambut, menunggang kuda, berpakaian militer lengkap dengan persenjataan (busur dan anak panah). Sejarah mengakui kecerdikan, ketegasan, keberanian, kegagahan dan kewibawaannya sebagai seorang pemimpin. Radhiyyah digambarkan sebagai pemimpin yang mampu menjalankan tugas dengan kecakapan yang tinggi sekaligus diakui ahli sejarah sebagai administrator yang sangat baik. Radhiyyah berkuasa selama kurang lebih empat tahun dengan penuh totalitas. Kekuatan kekuasaan Radhiyyah berakhir setelah mengalami kekalahan dalam pertempuran melawan balatentara yang dibentuk gubernurnya sendiri, Ikhtiyar al-Din Altuniyyah.⁶

⁵Fatima Mernissi menggambarkan totalitas Radhiyyah dalam memimpin dalam: Fatima Mernissi, 1994, h. 24, 25, 141, 143.

⁶Kepemimpinan Radhiyyah berakhir selain karena kerasnya pertarungan antar kepentingan politik, juga karena romantika kisah cinta dan cemburu. Kisah hidup dan riwayat kepemimpinan Radhiyyah mencapai klimaks yang tragis mirip seperti cerita dalam sebuah film sebagaimana gambaran dalam: Fatima Mernissi, 1994, h. 151-155.

Pemimpin perempuan selanjutnya adalah Sultanah Syajar al-Dur yang meraih kekuasaan Mesir pada 648 H/ 1250 M melalui kekuatan strategi militer yang dipimpinnya secara langsung. Sebagaimana Radhiyyah, sultanah Syajarat berasal dari kaum Mamluk (budak asal Turki) yang mengabdikan dalam bidang militer pada dinasti Ayyubiah Afrika. Setelah sang suami Sultan al-Malik al-Shaleh Ayyub wafat, Syajarat berpikir untuk merebut kekuasaan. Langkah pertama yang dilakukan Syajarat adalah dengan menyusun strategi untuk mengalahkan pasukan Prancis yang telah mengepung Mesir dari 647/ 1259 sampai 649/ 1260. Pasukan pimpinan Syajarat meraih kemenangan dalam Perang Salib dan berhasil menangkap Raja St. Louis IX Mernissi 1994, 145).

Setelah kemenangan dicapai, Syajarat menempatkan putera suaminya, Turan Syah sebagai penguasa, tetapi karena kepemimpinan Turan Syah tidak menarik rasa hormat para perwira militer, akhirnya Syajarah dinobatkan naik ke atas tahta kekuasaan. Saat berkuasa, Syajarat minta didoakan setiap waktu shalat Jum'at kepada rakyatnya yang isi doanya adalah: "Semoga Allah melindungi sang dermawan, Ratu Kaum Muslim, Yang diberkahi Dunia dan Iman, Ibu dari Khalil Al-Musta'miyyah (khalifah Abbasiyyah terakhir, al-Musta'sim), Sahabat Sultan Al-Malik Al-Shalih." Mengingat kepemimpinan Syajarah tidak diakui dinasti Abbasiyyah di Baghdad, kaum Mamluk menurunkan tahtanya setelah memimpin beberapa bulan (Mernissi 1994, 143).

Meski demikian karir Syajarat tidak berhenti sampai di situ, setelah menikah dengan jenderal Mamluk kandidat sultan Mesir, 'Izz al-Din Aybak, Syajarat kembali mendapatkan kekuasaan bersama-sama dengan suami barunya

tersebut.⁷ Mata uang dicetak atas nama mereka berdua, semua dokumen ditandatangani berdua dan mereka minta didoakan rakyatnya di setiap waktu shalat Jum'at. Keharmonisan tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun, kecemburuan Syajarat menghancurkan segalanya, termasuk kekuasaan dan kehidupan keduanya. Pusaranya terletak di halaman sekolah yang didirikannya saat berkuasa dan sekarang dikenal sebagai masjid Syajarat al-Dur. Pada kubah masjid berulisan gelar yang pernah disandangnya: "Ismat al-Dunya wa al-Din" (yang Dirahmati di Dunia dan Iman (akhirat) (Mernissi 1994, 156-157).

Di wilayah Islam lain juga terdapat pemimpin negara perempuan, yaitu Arwah. Arwah merupakan penguasa San'a wilayah Yaman sekitar akhir abad kesebelas dengan julukan "malikah". Sebagai penguasa, malikah Arwah menangani berbagai masalah kenegaraan serta merencanakan strategi peperangan dengan cemerlang. Berkat kecakapannya dalam memimpin, Arwah dapat berkuasa dalam waktu yang panjang, yaitu sampai akhir hayatnya (484/ 1090), tepatnya kurang lebih hampir setengah abad (Mernissi 1994, 26-27).

Di wilayah Afrika Utara terdapat malikah Zainab al-Nafzawiyah yang berasal dari bangsa Barbar. Zainab dipandang sebagai penguasa sebuah imperium besar yang wilayahnya sangat luas, mulai Afrika Utara sampai Spanyol dengan masa kekuasaan sekitar 47 (empat puluh tujuh) tahun, yaitu antara 453/ 1061 hingga 500/ 1107. Meskipun Zainab berbagi kekuasaan dengan suaminya, tetapi dia digambarkan

⁷Ada yang mengatakan, bahwa suami barunya merupakan pendiri Dunasti Mamalik. Lihat, M. Quraisy Shihab, 2005, h. 249.

sebagai sosok yang tidak saja bertanggung jawab atas kekuasaannya sendiri, melainkan juga bertanggung jawab penuh atas kekuasaan yang dipegang suaminya. Atas kenyataan tersebut, Zainab dijuluki "al-qaimah bi mulkihi" (orang yang bertanggung jawab atas kekuasaan suaminya). Dengan kata lain, Zainab merupakan aktor utama dari seluruh kekuasaan atau figur sentral atas pelaksanaan tugas-tugas kepala negara (Mernissi 1994, 27).

Perempuan Islam dalam Politik Masa Kini

Sejak awal tahun 1900, perempuan Islam hampir di semua negara mulai memiliki keberanian menunjukkan sikap bersama dalam memperjuangkan nasib dan hak-hak mereka. Perempuan-perempuan Mesir mulai mendirikan organisasi perempuan pertama sekitar tahun 1923 dengan dipimpin Hoda Sharawi. Organisasi ini berhasil menentang perkawinan gadis usia dini, namun gagal membuat perubahan undang-undang yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian sehingga sampai saat ini perempuan Mesir dapat dinikahi dan diceraikan kapan saja jika dikehendaki laki-laki atau suaminya. Keberhasilan perempuan Mesir dan perempuan Arab lain, seperti: Iraq, Yaman, Yordania, Libanon, Sudan dan Palestina adalah mampu memainkan peran penting dalam melawan imperium penjajahan.⁸

⁸Pembicaraan tentang perjuangan perempuan Islam biasanya mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh perempuan-perempuan di wilayah Arab/ Timur Tengah dengan segala persoalan budaya patriarki yang telah mengakar kuat. Lihat, Nawal el-Saadawi, 2011, Perempuan dalam Budaya Patriarki, terj. "The Hidden Face of Eve" oleh Zulhilmiasari, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 355-362.

Di wilayah dunia Arab lain, perempuan melakukan protes, melawan dan menuntut perlakuan yang sama dengan laki-laki serta memperjuangkan kesetaraan posisi dalam membangun masyarakat baru yang bebas dari eksploitasi dan agresi. Sementara di Kuwait, Lybia, Tunis dan Maroko, perempuan Islam berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keadilan, kemerdekaan, keadilan dan kebebasan. Undang-undang mengenai penghapusan poligami dan kesetaraan di wilayah negara-negara Arab mulai dibentuk dan diterapkan sehingga keadaan perempuan mulai menunjukkan tanda-tanda membaik, seperti dengan mulai diberikannya hak pilih pada perempuan.⁹

Seiring dengan berjalannya waktu, pengakuan terhadap hak pilih perempuan mulai terlihat. Dengan diberikannya hak pilih, perempuan mulai mendapatkan peran dan andil dalam kehidupan politik. Revolusi Rakyat Mesir tahun 1952 telah menghasilkan 50 persen kursi di parlemen/ Majelis Nasional untuk buruh dan petani, tanpa menyisakan satu kursi pun untuk perempuan. Kemudian pada tahun 1962 terjadi perkembangan yang makin baik dimana perempuan diberi posisi yang cukup tinggi, yaitu sebagai menteri di kabinet, padahal sebelumnya perempuan hanya bekerja di sektor rendahan dan menengah, seperti: petani, buruh pabrik atau paling tinggi sebagai pekerja di kantor.¹⁰

⁹Keadaan perempuan Arab memang sedikit membaik meskipun masih jauh dari harapan. Lihat, Nawal el-Saadawi, 2011, h.361-362.

¹⁰Perubahan tersebut masih dialami sebagian kecil perempuan Arab, sementara sebagian besar yang lain hidup dalam

Iklim politik dunia terus mengalami perkembangan sehingga perempuan di seluruh dunia, termasuk perempuan Islam berpacu memanfaatkan keadaan bagi reposisi diri perempuan. Setelah selesai perang dunia II, negara-negara dunia yang telah lelah dengan situasi ketakutan dan kecemasan dalam peperangan, mengupayakan iklim yang tenang dan damai. Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh semua negara dunia merupakan salah satu wujud dari upaya tersebut. Upaya lain berupa perhatian terhadap perempuan dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk berkumpul membuat wadah, mencari format terbaik bersama bagi masa depan perempuan. Secara khusus, PBB menetapkan Dekade Perempuan Internasional (International Decade of Women) tahun 1975 yang dilanjutkan dengan keputusan PBB tentang penghentian segala bentuk diskriminasi perempuan pada tahun 1979. Imbas dari keputusan tersebut adalah banyak produk perundang-undangan anti-diskriminasi dibuat oleh negara-negara dunia serta makin meningkat peran perempuan di segala bidang, baik pendidikan, ekonomi, maupun politik (Muhtar edisi 14 2000, 11-13).

Salah satu hasilnya adalah kebijakan Gender Mainstreaming atau Pengarusutamaan Gender (PUG) yang digagas perempuan/ feminis dunia pada Konferensi Perempuan ke-3 di Nairobi tahun 1985, kemudian dilegal-formalkan pada Konferensi Perempuan ke-4 di Beijing tahun 1995 (R Dewi No. 50 2006, 12). Tidak ingin kehilangan momentum, perempuan-perempuan di seluruh dunia, termasuk perempuan Islam mengambil langkah seribu bergerak untuk menempati posisi terdepan. Salah

kemiskinan dan penderitaan. Lihat, Nawal el-Saadawi, 2011, h. 363-364.

satu perempuan Islam yang memahami posisinya dan memanfaatkan momentum baik tersebut adalah Benazir Butho yang berhasil menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan Pakistan. Benazir Butho memperoleh kedudukan terhormat tersebut melalui kemenangan dari pemilihan langsung yang diselenggarakan pada tahun 1410/1988.¹¹

Di Indonesia, perempuan Islam juga berhasil menduduki posisi penting, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Megawati Sukarnoputri merupakan perempuan Islam Indonesia yang pertama kali berhasil menduduki jabatan pimpinan pemerintahan/presiden pada tahun 2001 menggantikan Abdurrahman Wahid. Megawati menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001 yang diadakan untuk menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Megawati dilantik tanggal 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999-2001, Mega menjabat Wakil Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri, 2 Juni 2014). Perempuan Islam Indonesia juga mulai mendapatkan jabatan menteri di kabinet. Dengan adanya perempuan Islam Indonesia yang mampu menduduki jabatan terhormat sebagai kepala pemerintahan, menandakan kemampuan perempuan Islam Indonesia yang dapat bersaing dengan laki-laki

dalam mengelola negara. Demikian juga di legislatif, perempuan Islam cukup banyak yang berhasil mendapat kepercayaan masyarakat menjadi anggota parlemen.

Persoalan Politik Perempuan di Indonesia

Secara umum, kualitas dan kuantitas kemampuan dan peran politik perempuan Indonesia mengalami peningkatan. Meski demikian, jika merujuk kepada ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), maka peran perempuan Indonesia secara keseluruhan masih tergolong rendah, bahkan dapat dianggap tertinggal. Hal ini terlihat pada hasil Pemilu 2009, yaitu: keterwakilan perempuan hanya 101 anggota (18,3 persen) dari 560 anggota DPR. Untuk DPD hanya 27 persen, sementara DPRD di 33 Provinsi hanya 16 persen dan DPRD kabupaten/kota hanya 12 persen. Masih terdapat 10 persen dari 497 kabupaten/kota yang tidak ada keterwakilan perempuan di legislatif. Adapun keterlibatan perempuan dalam pimpinan eksekutif hanya terdapat seorang menjadi gubernur dan seorang menjadi wakil gubernur dari 33 gubernur/kepala daerah. Perempuan yang menjadi bupati/walikota sebanyak 38 orang (7,6 persen) dari 497 kabupaten/kota. Perempuan yang menjadi menteri/wakil menteri baru mencapai 11 persen dari 56 menteri/wakil menteri atau setingkat menteri. Data ini membuktikan, bahwa persentase laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga banyak ditemukan kesenjangan gender yang cukup signifikan dalam pengambilan keputusan (<http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/14/12/749796/partisipasi>

¹¹Jika para ulama dan fuqaha sebelumnya memandang perempuan tidak pantas menjadi pemimpin pemerintahan karena alasan fitnah yang melekat pada perempuan, maka menurut Mernissi, Benazir Butho berani mengambil resiko fitnah tersebut. Lihat, Fatima Mernissi, 1994, h.294-295.

perempuan-dalam-politik-masih-rendah, 9 Juni 2014).

Laporan United Nation Development Program (UNDP) tahun 2013 menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2012 menduduki peringkat 121 dari 187 negara dengan skor 0,629. Angka ini meningkat tipis dari posisi tahun 2011 yang mencapai 124 dari 187 negara dengan skor 0,617.

Adapun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diukur dari tiga variabel yakni proporsi keterwakilan perempuan dalam parlemen, proporsi perempuan dalam pengambilan keputusan (Profesional) dan kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga. IDG tahun 2011 Indonesia menduduki rangking 80 dari 196 negara. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan (disparitas) gender yang signifikan. Oleh karena itu, perlu ada terobosan melalui komitmen keberpihakan sementara (affirmative) dari para penentu kebijakan untuk meningkatkan jumlah dan mutu keterwakilan perempuan dalam parlemen dan berbagai lembaga lainnya (<http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/14/12/749796/partisipasi-perempuan-dalam-politik-masih-rendah>, 9 Juni 2014).

Persoalan tidak selesai sampai di situ, meskipun perempuan telah masuk dan duduk di dunia politik, namun perannya dinilai belum maksimal. Peneliti Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), Dirga Ardiansa menemukan sejumlah kendala yang menghambat langkah perempuan di dunia politik (<http://indonesia.ucanews.com/2013/06/21/perempuan-masih-hadapi-kendala-dalam-dunia-politik>, 10 Juni 2014).

Pertama, adanya aturan dalam partai politik tertentu yang tidak

memperbolehkan perempuan duduk di pucuk pimpinan atau di bagian tertentu. Meskipun ketentuan ini hanya terdapat di partai tertentu, tetapi hal ini merupakan indikator yang kurang positif dalam perpolitikan Indonesia.

Kedua, proses pencalonan dan pemilihan masih menghalangi perempuan untuk terpilih sebagai anggota legislatif. Pada pemilihan 2009 misalnya, partisipasi calon legislatif perempuan sudah sesuai dengan undang-undang yang mengharuskan 30 persen perempuan, yaitu 33,6 persen, tetapi yang lolos meraih kursi anggota DPR RI hanya 18.4 persen atau 103 kursi dari 663 anggota DPR. Salah satu penyebabnya adalah karena penempatan nomor urut. Selama ini, nomor urut 1 selalu laki-laki, padahal penentuan nomor urut sangat menentukan tingkat keterpilihan perempuan. Berdasarkan pemilihan umum 2009, sebanyak 93 persen caleg perempuan DPR RI yang lolos adalah yang bernomor urut 1-3. Adapun untuk DPRD Provinsi ada 85 persen dan DPRD Kota/Kabupaten 82 persen. Hal ini menunjukkan, bahwa tingkat keterpilihan mereka sesuai nomor urut. Dengan demikian, nomor urut sangat penting.

Ketiga, kapasitas individu dari legislator perempuan dianggap tidak memiliki integritas yang baik dalam perpolitikan sehingga perannya selama ini hanya sebagai pengikut, bukan penentu. Keterlibatan perempuan dalam tiga fungsi dasar DPR sebagai legislasi, bajeting, dan kontroling (pengawasan) sering diabaikan. Perempuan sering tidak diikutkan dalam merumuskan dan memutuskan rancangan-rancangan penting.¹²

¹² Pendapat ini dikemukakan Yolanda Panjaitan, Puskapol UI, Lihat, <http://indonesia.ucanews.com/2013/06/>

Analisis dan Tawaran Solusi Filsafat Ekofeminisme

Sistem patriarki telah merasuki semua dimensi kehidupan, tak terkecuali dunia politik. Bidang ini bahkan dianggap sebagai bidang yang sangat kental sifat patriarkinya. Kata patriarki sendiri diartikan sebagai sebuah sistem yang dipenuhi oleh otoritas laki-laki yang menindas perempuan. Salah satu bentuk penindasan adalah kecenderungan memperlakukan jenis kelamin lain secara diskriminatif. Laki-laki diberi akses yang lebih besar dari pada perempuan, baik dalam institusi politik, sosial maupun ekonomi.¹³ Sesuai pengertian tersebut, selama ini dunia politik dianggap sebagai dunia laki-laki dengan segala sifat yang melekat di dalamnya, seperti: keras, penuh intrik, persaingan dan lain-lain. Bahkan politik disamakan dengan laki-laki.

Laki-laki mendominasi dunia politik tidak saja sebagai jenis kelamin, tetapi juga sebagai sebuah mainstream. Dengan kata lain, patriarki tidak saja berarti hegemoni laki-laki sebagai jenis kelamin, tetapi laki-laki sebagai arus utama; arus budaya; arus kelaziman/kebiasaan atau arus kepantasan. Perempuan sebagai "korban" atas sistem patriarki merasakan efeknya, seperti diperlakukan secara diskriminatif yang mencakup: diremehkan, dianggap tidak mampu, dibatasi dan lain sebagainya. Perempuan memiliki pengalaman

panjang mengenai suasana sistem patriarki yang berlangsung secara kultural dan struktural, dari masa pra-Islam, pasca-Islam sampai saat ini (Fakih 1997, 160-167, Lih. Harietta L Moore 1988, 8).

Seluruh pengalaman patriarkal telah mengakar kuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam diri perempuan sehingga pada saat perempuan memiliki kesempatan memimpin, disadari atau tidak, perempuan menggunakan cara-cara patriarki yang bersifat maskulin dalam kepemimpinannya. Perempuan menjadi sangat maskulin ketika menjadi seorang pemimpin pemerintahan karena maskulinitas telah menjadi "arus" atau "trend" yang menggerakkan siapapun yang duduk sebagai pemimpin. Radhiyyah misalnya, setelah menjabat sebagai sultanah mengikuti tradisi pemimpin laki-laki dengan melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, menyematkan gelar untuk dirinya "Radhiyyah al-Dunya wa al-Din" (yang diridhai di dunia dan agama/akhirat) dan "Balqis Jihan" (nama terhormat Arab ratu Syaba dan gelar kebangsawanan Arab). Kedua, mengabadikan kekuasaannya dengan mencetak mata uang dengan tulisan yang isinya adalah: "Pilar Kaum Perempuan, Ratu Segala Zaman, Sultanah Radhiyyah Binti Syams al-Din Illutmisyy".¹⁴

Gaya maskulin ditunjukkan Radhiyyah selanjutnya adalah: membuka wajah, memendekkan rambut, menunggang kuda, berpakaian militer lengkap dengan persenjataan (busur dan anak panah). Radhiyyah bergaya sebagaimana laki-laki dengan harapan akan menjadi pemimpin kuat

21/perempuan-masih-hadapi-kendala-dalam-dunia-politik, 14 Juni 2014.

¹³ Maggie Humm menjelaskan secara terperinci dengan memberikan perbandingan antara berbagai aliran feminis dunia. Lihat, Maggi Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, terj. "Dictionary of Feminist Theories", oleh Mundi Rahayu, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, h,332-335.

¹⁴ Fatima Mernissi menggambarkan totalitas Radhiyyah dalam memimpin dalam: Fatima Mernissi, 1994, h. 24, 25, 141, 143.

sebagaimana harapan masyarakat saat itu. Ditambah lagi, Radhiyyah sendiri diakui sejarah sebagai pemimpin perempuan yang memiliki kecerdikan, ketegasan, keberanian, kegagaha, kecakapan dan kewibawaan yang bagus. Radhiyyah juga mengakhiri kekuasaannya secara maskulin juga, yaitu karena kalah dalam pertempuran (Mernissi 1994, 141, 143).

Adapun Sultanah Syajarat al-Dur menunjukkan maskulinitasnya dengan memenuhi diri dengan ambisi-ambisi, seperti: meraih kekuasaan melalui kekuatan militer yang dipimpinya, menyusun strategi mengalahkan pasukan lawan, mencetak mata uang atas namanya dan suaminya (karena suaminya yang kedua saat itu memiliki legalitas kekuasaan), selalu mengupayakan kemenangan,¹⁵ memberi gelar diri dengan gelar yang pernah disandangnya dulu: "Ismat al-Dunya wa al-Din" (yang Dirahmati di Dunia dan Iman (akhirat) (Mernissi 1994, 156-157). Kemudian memposisikan diri sebagai orang mulia yang selalu didoakan di setiap waktu shalat Jum'at kepada rakyatnya: "Semoga Allah melindungi sang dermawan, Ratu Kaum Muslim, Yang diberkahi Dunia dan Iman, Ibu dari Khalil Al-Musta'miyyah (khalifah Abbasiyyah terakhir, al-Musta'sim), Sahabat Sultan Al-Malik Al-Shalih." Syajarat mengakhiri kekuasaannya dengan ambisi kecemburuan (Mernissi 1994, 143).

Maskulinitas malikah Arwah terlihat dari kepiawaiannya menangani berbagai masalah kenegaraan serta kemampuan mengatur strategi peperangan dan dapat berkuasa kurang lebih setengah abad (Mernissi 1994, 26-

¹⁵ Ada yang mengatakan, bahwa suami barunya merupakan pendiri Dinasti Mamalik. Lihat, M. Quraisy Shihab, 2005, h. 249.

27). Demikian pula malikah Zainab al-Nafzawiyyah yang menguasai imperium besar, memiliki julukan "al-qaimah bi mulkihi" (orang yang bertanggung jawab atas kekuasaannya (dan suaminya) (Mernissi 1994, 27). Benazir Butho juga menunjukkan maskulinitasnya dengan kemampuannya mengimbangi kekuatan politik laki-laki India dengan kemenangan dari pemilihan umum langsung tahun 1410/ 1988.¹⁶

Di Indonesia, Megawati Sukarnoputri adalah perempuan Islam Indonesia yang pertama kali berhasil menduduki jabatan pimpinan pemerintahan/ presiden pada tahun 2001 menggantikan Abdurrahman Wahid 23 Juli 2001. Sebelum menjadi presiden (1999-2001), Megawati menjabat Wakil Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri, 2 Juni 2014).

Di bidang legislatif, adanya persoalan, seperti: keterwakilan perempuan yang masih rendah, ketertinggalan kapasitas dan kurangnya integritas perempuan sebagai legislator, menandakan bahwa perempuan Indonesia belum menjadi sosok feminin. Perempuan Indonesia di lembaga ini justru memperlihatkan maskulinitasnya dengan menerima secara suka rela terhadap sistem yang ada. Disadari atau tidak, mereka menjadi permisif dan larut dalam permainan sistem patriarki.¹⁷

¹⁶ Jika para ulama dan fuqaha sebelumnya memandang perempuan tidak pantas menjadi pemimpin pemerintahan karena alasan fitnah yang melekat pada perempuan, maka menurut Mernissi, Benazir Butho berani mengambil resiko fitnah tersebut. Lihat, Fatima Mernissi, 1994, h.294-295.

¹⁷ Pendapat ini dikemukakan Yolanda Panjaitan, Puskapol UI, Lihat, <http://indonesia.ucanews.com/>

Sebagaimana yang telah diketahui, tugas anggota parlemen adalah mendengar dan menyuarakan aspirasi rakyat, kemudian memperjuangkan dan menuangkannya dalam bentuk aturan/perundang-undangan, akan tetapi yang terjadi tidak selalu demikian. Tidak sedikit anggota parlemen perempuan yang tidak mengerti tugas dan tanggung-jawabnya sebagai wakil rakyat dan wakil perempuan. Lebih parah lagi, mereka membiarkan ketidaktahuan tersebut sampai berakhir masa jabatan sehingga dapat dikatakan, mereka telah menjadi agen maskulinitas yang merugikan kepentingan perempuan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Atas kenyataan tersebut, perempuan yang telah menduduki jabatan-jabatan penting, baik di lembaga eksekutif, legislatif atau lembaga lainnya telah menjadi "tiruan laki-laki" (male clone). Jenis kelamin memang sebagai perempuan, tetapi secara kesadaran lebih mirip seperti laki-laki. Salah seorang feminis perempuan Islam Indonesia, Ratna Megawangi secara jelas mengatakan:

"Apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke dunia maskulin yang tadinya didominasi oleh pria adalah, para perempuan ternyata tidak menonjolkan kualitas femininnya, tetapi justru menjadi male clone (tiruan laki-laki) dan masuk dalam perangkat sistem maskulin yang hirarkis." (Megawangi 1999, 183).

Maskulinitas telah mencengkram kuat ke semua sistem kehidupan, bahkan perempuan sendiri telah menjadi bagian dari sistem maskulin yang selama ini dikeluhkan dan dikritiknya sendiri. Bagaimana mungkin perempuan dapat menyuarakan

kepentingan perempuan dan rakyat, sementara menyuarakan dan memperjuangkan dirinya sendiri saja tidak mampu. Mereka seperti mengalami ketakutan dan tidak kuasa menghadapi hegemoni patriarki sehingga yang terjadi sebaliknya, malah meniru dan menjadi "laki-laki". Kualitas dan sensitifitas feminin yang seharusnya ditampilkan, justru tenggelam dalam maskulinitas.

Ini lah yang disebut dengan "blunder maskulinitas". Perempuan telah kehilangan kesadaran ideologisnya sendiri, yaitu pembela feminitas diantara hiruk pikuk laki-laki sebagaimana kehendaknya yang ingin mengikuti langkah gerakan perempuan dunia, yaitu feminisme. Keberpihakan perempuan-perempuan tersebut kepada maskulinitas telah melemahkan feminitas, padahal seharusnya feminitas diperkuat dan dibela. Pembelaan terhadap feminitas dapat berwujud kepekaan dan kepedulian terhadap kelompok masyarakat lemah yang dalam hal ini termasuk perempuan itu sendiri. Dalam kenyataannya, mereka telah menempatkan diri di dalam lingkaran maskulinitas atau semacam persekutuan dengan maskulinitas yang menjadikan keduanya menjadi satu kesatuan. Mansur Fakih menyebut kondisi tersebut dengan meminjam istilah Freire sebagai *emphathize to oppressors* yaitu merasa menyatu atau seakan merasa sama sebagai penekan/penindas perempuan.¹⁸

¹⁸ Mansour Fakih mengemukakan istilah *emphathize to oppressors* dan istilah *blunder maskulinitas* tersebut ditujukan kepada perempuan yang pada awalnya ingin diakui setara oleh laki-laki, tetapi ketika mencapai kesetaraan (dengan menduduki posisi penting di ruang public, ternyata berpitar-putar dalam lingkaran laki-laki dan menjadi menjadi bagian laki-laki. Lihat Mansour Fakih, 1997, Analisis Gender dan

2013/06/21/perempuan-masih-hadapi-kendala-dalam-dunia-politik, 10 Juni 2014.

Jika keadaan ini terus berlangsung, maka keterlibatan perempuan Islam di dunia politik tidak akan memberikan imbas apa-apa bagi rakyat perempuan yang telah memilih dan mendaulatnya sebagai pemimpin atau figur sentral yang terhormat. Pengecualian akan terjadi jika perempuan-perempuan yang terhormat tersebut mampu menggali dan memahami otentisitas dirinya yang feminin sebagai penyeimbang maskulinitas yang terlanjur mendominasi perpolitikan pada khususnya dan semua bidang kehidupan umumnya. Feminitas akan menuntun perempuan untuk menolak segala bentuk hegemoni dan budaya tunggal. Sebaliknya, membuka diri pada keanekaragaman sebagai kekuatan karena keanekaragaman mendasari semua aktivitas dan tempat bergantung semua kehidupan (Shiva & Mies 2005, 189).

Keanekaragaman yang melindungi dan “menghidupkan” segala elemen kehidupan, menjadi dasar tindakan dan identitas perempuan. Perempuan dengan dengan feminitasnya akan mampu memelihara keberlangsungan diri dan lingkungannya mengimbangi maskulinitas sistem patriarki yang memposisikan segala hal di luar diri (termasuk lingkungan dan alam) sebagai “yang lain”. Feminitas tidak melemahkan perempuan, tetapi sebaliknya secara tegas mengambil sikap dan memposisikan diri sejajar dengan laki-laki dalam suasana harmonis. Cara inilah yang ditawarkan oleh filsafat ekofeminisme (Shiva & Mies 2005, 190 dan Lih. Alan Watt 1995, 24-25).

Penutup

Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.109-110.

Keterlibatan perempuan Islam di dunia politik sejak masa klasik sampai saat ini membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin yang tidak kalah dengan laki-laki meskipun perdebatan tentang penolakan dan penerimaan terhadap kiprah politik perempuan terus berlangsung. Eksistensi perempuan dalam perpolitikan telah mendapat pengakuan sejarah, baik di dunia maupun di Indonesia. Beberapa kemajuan telah diraih perempuan Islam Indonesia dan beberapa persoalan menuntut kajian dan rumusan terbaik. Diantara persoalan tersebut adalah kecenderungan maskulin yang terjadi pada perempuan yang telah mendapatkan kedudukan terhormat, seperti di eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, feminitas menjadi salah satu alternatif penyeimbang dari maskulinitas yang terdapat dalam kekuatan sistem politik patriarki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, ed. 2006. Sangkan Paran Gender, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Asa, Syu'ba dkk.. 2000. Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti.
- Dewi, Sinta R. 2006. Gender Mainstreaming: Feminisme, Gender dan Transformasi Institusi, Jurnal Perempuan, No. 50, Jakarta.
- Engineer, Ashgar Ali. 2000. Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 1997. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatima. 1994. Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan, terj. “The Forgotten Queen of Islam” oleh Rahmani Astuti dan Enna Hadi, Bandung: Mizan.

- Humm, Maggi, Ensiklopedia Feminisme, terj. "Dictionary of Feminist Theories", oleh Mundi Rahayu, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Moore, Harietta L. 1988. *Feminism and Antropology*, Politiy Press, Cambridge.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan.
- Maggi Humm, Maggi, Ensiklopedia Feminisme, terj. "Dictionary of Feminist Theories", oleh Mundi Rahayu, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Muhammad, Husein. 2006. *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Rihlah.
- . 2013. *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKiS.
- . 2007. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS..
- Mucktar, Yanti. 2000. *Gerakan Perempuan Indonesia*, Edisi 14, Jurnal Perempuan, Jakarta.
- el-Saadawi, Nawal. 2011. *Perempuan dalam Budaya Patriarkhi*, terj. "The Hidden Face of Eve" oleh Zulhilmiyasari, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Shihab, M. Quraisy. 2005. *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shiva, Vandana & Maria Mies. 2005. *Ekofeminisme: Prespektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, terj. "Ecofeminsme", oleh Kelik Ismunanto dan Lilik, Yogyakarta: IRE Press.
- Watt, Alan. 1995. *The Tao of Philosophy*, USA: Turtle Publishing.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri, 2 Juni 2014.
- <http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/14/12/749796/partisipasi-perempuan-dalam-politik-masih-rendah>, 9 Juni 2014.
- <http://indonesia.ucanews.com/2013/06/21/perempuan-masih-hadapi-kendala-dalam-dunia-politik/>, 10 Juni 2014.